



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 180 / 457 / 2019

TENTANG

PENUNJUKKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kudus, perlu menunjuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah / Unit Kerja / Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);





14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah / Unit Kerja / Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan perencanaan, pengkoordinasian, dan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di lingkungannya; dan
  - b. menyerahkan *minute* produk hukum daerah ke Bagian Hukum sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 180 /397 / 2006 tentang Penunjukkan Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Di Unit Penunjang Jaringan (UPJ) Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt.BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.



## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 31 Desember 2019

Nomor : 180 / 457 / 2019

PENUNJUKKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/DESA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO	INSTANSI	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	
2.	Inspektorat Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
3.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
4.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
5.	Dinas Kesehatan	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
10.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
11.	Dinas Perdagangan	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
13.	Dinas Perhubungan	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	



NO	INSTANSI	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
15.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
16.	Dinas Pertanian dan Pangan	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
18.	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
19.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
20.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
21.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris	
23.	RSUD dr. Loekmono Hadi	Kasubag.pelayanan, informasi dan publikasi	
24.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Subbagian Tata Usaha	
25.	Bagian Pemerintahan	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan	
26.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat	
27.	Bagian Perekonomian	Kepala Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
28.	Bagian Administrasi Pembangunan	Kepala Subbagian Penyusunan Program	
29.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
30.	Bagian Umum	Kepala Subbagian TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	
31.	Bagian Organisasi	Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

NO	INSTANSI	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
32.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Subbagian Protokol	
33.	Kecamatan Mejobo	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
34.	Kecamatan Dawe	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
35.	Kecamatan Kota	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
36.	Kecamatan Bae	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
37.	Kecamatan Kaliwungu	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
38.	Kecamatan Gebog	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
39.	Kecamatan Undaan	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
40.	Kecamatan Jekulo	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
41.	Kecamatan Jati	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
42.	Desa Gulang	Sekretaris Desa	
43.	Desa Jepang	Sekretaris Desa	
44.	Desa Payaman	Sekretaris Desa	
45.	Desa Kirig	Sekretaris Desa	
46.	Desa Temulus	Sekretaris Desa	
47.	Desa Kesambi	Sekretaris Desa	
48.	Desa Jojo	Sekretaris Desa	
49.	Desa Hadiwarno	Sekretaris Desa	
50.	Desa Mejobo	Sekretaris Desa	
51.	Desa Gulantepus	Sekretaris Desa	
52.	Desa Tenggeles	Sekretaris Desa	
53.	Desa Samirejo	Sekretaris Desa	
54.	Desa Kuwukan	Sekretaris Desa	
55.	Desa Glagah Kulon	Sekretaris Desa	
56.	Desa Rejosari	Sekretaris Desa	
57.	Desa Kandangmas	Sekretaris Desa	
58.	Desa Kajar	Sekretaris Desa	
59.	Desa Margorejo	Sekretaris Desa	
60.	Desa Soco	Sekretaris Desa	
61.	Desa Cranggang	Sekretaris Desa	
62.	Desa Ternadi	Sekretaris Desa	
63.	Desa Japan	Sekretaris Desa	

*h-10*



NO	INSTANSI	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
64.	Desa Colo	Sekretaris Desa	
65.	Desa Lau	Sekretaris Desa	
66.	Desa Piji	Sekretaris Desa	
67.	Desa Dukuhwaringin	Sekretaris Desa	
68.	Desa Puyoh	Sekretaris Desa	
69.	Desa Tergo	Sekretaris Desa	
70.	Desa Cendono	Sekretaris Desa	
71.	Desa Janggalan	Sekretaris Desa	
72.	Desa Demangan	Sekretaris Desa	
73.	Desa Mlati Lor	Sekretaris Desa	
74.	Desa Nganguk	Sekretaris Desa	
75.	Desa Kramat	Sekretaris Desa	
76.	Desa Demaan	Sekretaris Desa	
77.	Desa Damaran	Sekretaris Desa	
78.	Desa Kauman	Sekretaris Desa	
79.	Desa Krandon	Sekretaris Desa	
80.	Desa Singocandi	Sekretaris Desa	
81.	Desa Glantengan	Sekretaris Desa	
82.	Desa Barongan	Sekretaris Desa	
83.	Desa Burikan	Sekretaris Desa	
84.	Desa Rendeng	Sekretaris Desa	
85.	Desa Kaliputu	Sekretaris Desa	
86.	Desa Langgardalem	Sekretaris Desa	
87.	Desa Wonosoco	Sekretaris Desa	
88.	Desa Lambangan	Sekretaris Desa	
89.	Desa Kalirejo	Sekretaris Desa	
90.	Desa Medini	Sekretaris Desa	
91.	Desa Sambung	Sekretaris Desa	
92.	Desa Glagahwaru	Sekretaris Desa	
93.	Desa Kutuk	Sekretaris Desa	
94.	Desa Undaan Kidul	Sekretaris Desa	
95.	Desa Undaan Tengah	Sekretaris Desa	
96.	Desa Karangrowo	Sekretaris Desa	
97.	Desa Larikrejo	Sekretaris Desa	
98.	Desa Undaan Lor	Sekretaris Desa	
99.	Desa Wates	Sekretaris Desa	
100.	Desa Ngemplak	Sekretaris Desa	
101.	Desa Terangmas	Sekretaris Desa	
102.	Desa Berugenjang	Sekretaris Desa	
103.	Desa Jekulo	Sekretaris Desa	
104.	Desa Pladen	Sekretaris Desa	
105.	Desa Sidomulyo	Sekretaris Desa	
106.	Desa Sadang	Sekretaris Desa	
107.	Desa Klaling	Sekretaris Desa	
108.	Desa Bulungcangkring	Sekretaris Desa	
109.	Desa Bulung Kulon	Sekretaris Desa	
110.	Desa Terban	Sekretaris Desa	
111.	Desa Gondoharum	Sekretaris Desa	
112.	Desa Hadipolo	Sekretaris Desa	
113.	Desa Tanjungsrejo	Sekretaris Desa	

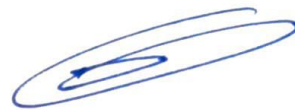


NO	INSTANSI	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
114.	Desa Honggosoco	Sekretaris Desa	
115.	Desa Bakalankrapyak	Sekretaris Desa	
116.	Desa Prambatan Kidul	Sekretaris Desa	
117.	Desa Prambatan Lor	Sekretaris Desa	
118.	Desa Garung Lor	Sekretaris Desa	
119.	Desa Garung Kidul	Sekretaris Desa	
120.	Desa Karangampel	Sekretaris Desa	
121.	Desa Kedungdowo	Sekretaris Desa	
122.	Desa Mijen	Sekretaris Desa	
123.	Desa Setrokalangan	Sekretaris Desa	
124.	Desa Gamong	Sekretaris Desa	
125.	Desa Banget	Sekretaris Desa	
126.	Desa Papringan	Sekretaris Desa	
127.	Desa Sidorekso	Sekretaris Desa	
128.	Desa Blimbing Kidul	Sekretaris Desa	
129.	Desa Kaliwungu	Sekretaris Desa	
130.	Desa Tanjungkarang	Sekretaris Desa	
131.	Desa Jetis Kapuan	Sekretaris Desa	
132.	Desa Loram Kulon	Sekretaris Desa	
133.	Desa Jati Wetan	Sekretaris Desa	
134.	Desa Jati Kulon	Sekretaris Desa	
135.	Desa Pasuruhan Lor	Sekretaris Desa	
136.	Desa Pasuruhan Kidul	Sekretaris Desa	
137.	Desa Ploso	Sekretaris Desa	
138.	Desa Getas Pejaten	Sekretaris Desa	
139.	Desa Loram Wetan	Sekretaris Desa	
140.	Desa Jepangakis	Sekretaris Desa	
141.	Desa Megawon	Sekretaris Desa	
142.	Desa Tumpangkrasak	Sekretaris Desa	
143.	Desa Ngembal Kulon	Sekretaris Desa	
144.	Desa Peganjaran	Sekretaris Desa	
145.	Desa Panjang	Sekretaris Desa	
146.	Desa Purworejo	Sekretaris Desa	
147.	Desa Bacin	Sekretaris Desa	
148.	Desa Pedawang	Sekretaris Desa	
149.	Desa Dersalam	Sekretaris Desa	
150.	Desa Karangbener	Sekretaris Desa	
151.	Desa Ngembal Rejo	Sekretaris Desa	
152.	Desa Gondangmanis	Sekretaris Desa	
153.	Desa Bae	Sekretaris Desa	
154.	Desa Rahtawu	Sekretaris Desa	
155.	Desa Menawan	Sekretaris Desa	
156.	Desa Kedungsari	Sekretaris Desa	
157.	Desa Gondosari	Sekretaris Desa	
158.	Desa Jurang	Sekretaris Desa	
159.	Desa Besito	Sekretaris Desa	
160.	Desa Karangmalang	Sekretaris Desa	
161.	Desa Padurenan	Sekretaris Desa	
162.	Desa Getassrabi	Sekretaris Desa	
163.	Desa Klumpit	Sekretaris Desa	



NO	INSTANSI	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
164.	Desa Gribig	Sekretaris Desa	
165.	Kelurahan Panjunan	Sekretaris Kelurahan	
166.	Kelurahan Mlatinorowito	Sekretaris Kelurahan	
167.	Kelurahan Kerjasan	Sekretaris Kelurahan	
168.	Kelurahan Wergu Kulon	Sekretaris Kelurahan	
169.	Kelurahan Wergu Wetan	Sekretaris Kelurahan	
170.	Kelurahan Kajeksan	Sekretaris Kelurahan	
171.	Kelurahan Mlati Kidul	Sekretaris Kelurahan	
172.	Kelurahan Sunggingan	Sekretaris Kelurahan	
173.	Kelurahan Purwosari	Sekretaris Kelurahan	

Plt. BUPATI KUDUS,  
WAKIL BUPATI



HARTOPO

